

**MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Menyambut KTT G20
Di Nusa Dua)**

Oleh,
Ni Kadek Cindy Arieska Putri, NIM. 1914101098
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan mekanisme dan dasar penetapan ganti kerugian pengadaan tanah di tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ini sendiri merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dalam hal ini yang menjadi landasan yuridis pengadaan tanah adalah Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan tanah disertai dengan pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Dalam pelaksanaannya pengadaan tanah tidak selalu berjalan mulus dimana seringkali terdapat warga masyarakat yang terkena pengadaan tidak puas dengan besarnya nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan umum pelebaran jalan untuk menyambut KTT G20 di Nusa Dua? 2. Bagaimana dasar penetapan nilai ganti kerugian pada sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Nusa Dua?. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah haruslah berdasarkan musyawarah antara panitia dan pemegang hak atas tanah apabila tidak mencapai kesepakatan maka dalam hal ini pemerintah melakukan konsinyasi atau dana ganti kerugian di titipkan di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Ganti rugi, Kepentingan umum, Pengadaan tanah

***MECHANISM OF IMPLEMENTATION AND DETERMINATION OF
COMPENSATION IN THE SETTLEMENT OF LAND PROCUREMENT
DISPUTES STUDY ON THE LAW NUMBER 2 YEAR 2012 (Case Study of Land
Acquisition for Road Widening for the G20 Summit in Nusa Dua)***

By,

Ni Kadek Cindy Arieska Putri, NIM. 1914101098

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze related to the mechanism and basis for determining compensation for land acquisition in terms of Law No. 2 of 2012. The type of research that will be used by researchers is empirical juridical research. This type of empirical juridical research itself is a type of legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society or research conducted on the actual situation that occurs in society, in this case the juridical basis for land acquisition is Law number 2 2012 concerning Land Acquisition for development in the public interest. Land acquisition is an activity of taking land by the government in the context of carrying out development for the public interest of land acquisition accompanied by the provision of compensation to the people affected by land acquisition. In its implementation, land acquisition does not always run smoothly where there are often members of the community affected by the procurement who are dissatisfied with the amount of compensation given by the government. way to welcome the G20 Summit in Nusa Dua? 2. What is the basis for determining the value of compensation in land acquisition disputes for the public interest in Nusa Dua? Compensation mechanisms in land acquisition must be based on deliberations between the committee and land rights holders. If they do not reach an agreement, in this case the government makes a consignment or the compensation funds are deposited in the District Court.

Keywords: Compensation, Public interest, Land acquisition